PROSES PEMBINAAN TAHAP AKHIR BAGI WARGA BINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II B KOTA KUPANG

Finsensius Samara¹, Sonia Klara Seke², Crameraldo anugerah Putra Openg³,

Melani Anastasia Wijono⁴, Derryl Yosef Mario P. Milo⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: finsensiussamarafh@gamil.com, jjen65271@gmail.com, crameraldo.putra@gmail.com,
wijonomelan01@gmail.com, miloderryl@gmai.com

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Mengingat fisik dan psikologis narapidana perempuan berbeda dengan narapidana laki-laki, maka pembinaan narapidana perempuan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dan kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci: Proses pembinaan, narapidana perempuan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

In the criminal justice system, the Correctional Institution is the last institution of the criminal justice system. Correctional facility is a place to carry out coaching for inmates and Correctional Students. Considering that the physical and psychological aspects of female inmates are different from those of male inmates, so the coaching of female inmates must be placed in a Female's Correctional Institution. This study aims to find out the process of implementing training for female inmates and obstacles for Correctional Institution in implementing coaching for female inmates and their efforts to overcome these obstacles.

Keywords: Coaching process, female inmates, Correctional Institution.

PENDAHULUAN

• Latar Belakang

Manusia sebagai ciptaan Tuhan ketika dilahirkan di dunia ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, salah satu hal yang mempengaruhi ciri dan sifat dari perilaku seorang manusia adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia cenderung memiliki tingkat kepuasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di sini mulai terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang berasal dari keluarga yang berbeda derajatnya menurut ekonomi, dalam hal tingkat kepuasan terhadap faktor

pemenuhan kebutuhan hidup. Si kaya cenderung beranggapan bahwa barang-barang yang mewah dan berharga tinggi yang dapat menjadi puncak dari kepuasan dalam hidupnya, sedangkan si miskin hanya beranggapan apabila ia tetap bisa bertahan hidup sampai keesokan hari maka itu sudah cukup bagi dirinya. Dalam kedua hal ini dapat diketahui bahwa perekonomianlah yang menjadi akar permasalahan.

Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas. Untuk menangani hal tersebut maka Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto.

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana.

Kejahatan atau sering disebut dengan *crime* merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial didalam masyarakat sehingga masyarakat menentangnya. Bonger mengatakan bahwa arti kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat harus diberi pidana. Jika ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan bagian dari integral perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut bisa menghambat cita-cita masyarakat untuk hidup aman dan tentram di dalam masyarakat.

Hingga saat ini hukum pidana masih menjadi sarana yang sangat penting dalam penanggulangan kejahatan *criminal policy*. Dalam implementasi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan pada tahap kebijakan aplikatif dan eksekutif, dilaksanakan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan efek jera.

Dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana yang selanjutnya disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu resosialisasi pelanggar hukum dan rehabilitasi, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Dengan pembinaan ini diharapkan bisa membuat narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulang perbuatannya lagi.

Pembangunan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi menjadi salah satu fokus dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting sebagai wahana pembinaan bagi narapidana. Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, pembinaan tahap akhir menjadi krusial untuk mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan di luar setelah menjalani masa hukuman. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan psikologis yang mendalam.

Pentingnya pembinaan tahap akhir di LP perempuan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah narapidana perempuan yang mengalami masalah sosial dan ekonomi setelah dibebaskan. Banyak dari mereka menghadapi stigma masyarakat, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, dan keterbatasan akses terhadap layanan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif dalam pembinaan yang tidak hanya mengedepankan aspek hukumnya, tetapi juga memberikan dukungan sosial dan psikologis yang memadai.

Dari perspektif hukum, pembinaan tahap akhir di LP perempuan harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan turunannya. Regulasi ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari hak narapidana. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan fasilitas, dan pemahaman yang berbeda di antara petugas pemasyarakatan tentang pentingnya pembinaan.

Selanjutnya, makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai metode dan strategi yang diterapkan dalam pembinaan tahap akhir di LP perempuan. Fokus utama akan diberikan pada upaya hukum yang dapat mendukung proses reintegrasi, seperti program pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan dukungan komunitas. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mendukung narapidana perempuan dalam kembali ke masyarakat.

Akhirnya, analisis terhadap pembinaan tahap akhir di LP perempuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi narapidana sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang manusiawi dan berkeadilan.

- Rumusan Masalah

1. Pengertian Lapas dan fungsi lapas dalam hukum pidana?
2. Bagaimana proses pembinaan tahap akhir didalam Lapas Perempuan kelas II B Kota Kupang?

- Tujuan Penulisan

1. Agar para penulis serta pembaca dapat mengetahui pengertian dan fungsi lapas dalam aspek hukum pidana.
2. Agar para penulis serta pembaca dapat mengetahui bagaimana proses serta hasil pembinaan tahap akhir didalam Lapas Perempuan Kelas II B Kota Kupang.

- Metode Penelitian

Artikel jurnal ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan wawancara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang mekanisme serta proses pembinaan tahap akhir di dalam Lapas

Perempuan II B Kota Kupang. Ini melibatkan analisis melalui wawancara, observasi dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Hukum Pidana

Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan negara (state) dan warga negara (society) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Di Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU. Pemasyarakatan) bahwa "Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana"

Seluruh ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan undangundang ini pemasyarakatan menjadi wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berbunyi "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan,

anak dan warga binaan.” Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan. Indonesia termasuk dalam daftar negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan sulitnya lapangan pekerjaan setiap tahunnya mengakibatkan angka kejahatan semakin tinggi. Untuk mencegah perbuatan kejahatan agar tidak terulang kembali maka diberikan penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Penjatuhan pidana diberikan tidak hanya sebagai bentuk balas dendam tetapi upaya untuk mengembalikan keadaan lingkungan masyarakat agar kembali aman, tertib dan kondusif. Pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi untuk menyadarkan pelaku perbuatan pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya.

Sistem pemasyarakatan dalam lapas ditujukan sebagai upaya membentuk narapidana agar menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangan. Hanya saja setiap manusia juga pastinya dapat membuat dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti dengan menyadari kesalahan yang ia perbuat, memperbaiki sikap diri sendiri sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dibuatnya hingga sampai kepada pelanggaran hukum dan bisa kembali diterima oleh lingkungan masyarakatnya serta kembali berkontribusi aktif dalam lingkungannya, dan dapat melaksanakan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu sistem pemasyarakatan dalam lapas diharapkan dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Agar hal tersebut tidak berulang ketika ia sudah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana akan diberikan pembinaan kemandirian yang berisikan program keterampilan yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan. Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, agar hal tersebut tidak berulang ketika ia sudah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana akan diberikan pembinaan kemandirian yang berisikan program keterampilan yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat Warga

Binaan Pemasyarakatan. Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau menjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. Sebagai fungsinya lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam lembaga pemasyarakatan, WBP mendapat pembinaan dan pemberdayaan sehingga dapat kembali berpartisipasi dalam pembangunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan hidup yang dimilikinya serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Lapas Perempuan Semarang sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan yaitu tempat bagi warga binaan untuk menjalani pidananya dan memperoleh berbagai macam pembinaan seperti pembinaan kemandirian serta pembinaan kepribadian. Beberapa jenis program yang ada dalam pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Semarang antara lain bidang kerajinan, membuat, memasak, bakery, menyulam, merajut, menjahit dan laundry, salon dan sebagainya.

Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu model/program yang bergerak dibidang pengembangan *Life Skill* terhadap warga binaan dalam masa pembinaan di Lapas memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi warga binaan serta mampu menjalani masa tindak pidana di Lapas. Pembinaan kemandirian ini merupakan rangkaian program yang bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan agar mereka dapat sukses reintegrasi ke dalam masyarakat. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, konseling, dan dukungan sosial.

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut sebagai Narapidana. Lapas sendiri merupakan tempat Dimana Narapidana itu menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidan dan anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaanya dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana, merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang menjalani masa pidana yang hendak direhabilitasi atau dibina ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) Narapidana ke dalam masyarakat merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara konseptual lebih menggunakan prinsip menempatkan Narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara yang dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan yang terarah.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebut bahwa bagi Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar pemenjaraan namun juga merupakan suatu usaha Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu fungsi pemidanaan yang sejak lebih tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualita

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan terkhusus narapidana wanita melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut sertaan masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan narapidana wanita dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan). Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga- lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembinaan Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi dalam mewujudkan tujuan akhir dalam sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro merupakan system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas- batas toleransi masyarakat. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem Peradilan Pidana yaitu Resosialisasi pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan, dan kesejahteraan sosial. Wanita dikatakan sebagai “tiang negara” dewasa ini telah menjadi suatu hal yang banyak diperbincangkan. Dahulu sebelum berkembang masa emansipasi, wanita dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan rumah

tangga dan selayaknya menempati posisi strategis dalam bidang pekerjaan, begitu pula anggapan masyarakat luas yang mengatakan bahwa tidak layak seorang wanita melakukan pekerjaan laki-laki dan berbuat kesalahan seperti laki-laki, sehingga ketika mendengar kata “penjara” atau lembaga pemasyarakatan maka terlintas dalam pikiran adalah seorang laki-laki dewasa yang sedang dihukum dengan masa kurungan tertentu. Seiring berjalannya waktu, setelah konsep emansipasi yang diartikan sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkembang, mulai banyak konsep kesetaraan yang dibuat, misalnya pemimpin perusahaan-perusahaan besar bahkan hingga pemimpin negara telah lumrah ditempati oleh perempuan. Dalam bidang kriminalitas, kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa bisa juga dilakukan seorang perempuan, misalnya membunuh, merampok, hingga korupsi.

2. Proses Pembinaan Tahap Akhir di LAPAS Perempuan Kelas II B Kota Kupang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap
2. Orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang di sel

4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Warga Binaan atau Narapidana dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana. Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.⁵ Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Narapidana diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaanya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan- kegiatan

fisik. Ini menjadi system kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat jera (regred) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-perturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.

Model sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini menghilangkan liberal colonial. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan hanya diberikan untuk mengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis, membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan untuk merubah perilaku narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses.
- b. Pembaharuan, penyempurnaan.
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu.

Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu. Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi.

Lebih lanjut lagi dijelaskan pengertian Pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

- 1) Pembinaan kesadaran beragama.
- 2) Pembinaan berbangsa dan bernegara.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- 4) Pembinaan kesadaran hukum.
- 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- 3.) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- 4.) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain:

- a. Narapidana itu sendiri.
- b. Para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan
- c. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari Narapidana itu sendiri.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki karena perempuan mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Hal ini diatur dalam UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat 1 dan 2: Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Ayat 2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Berdasarkan ketentuan UU no. 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka dibuatlah LAPAS khusus untuk perempuan. Tujuan didirikannya LAPAS perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana perempuan dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.

Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum perempuan. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan perempuan juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingk dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik perempuan biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki.

Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan perempuan juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya.

Sedangkan untuk narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP no. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5

Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Ayat 3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

Kemandirian menurut kamus pintar Bahasa Indonesia adalah yang bersifat mendidik dan atau yang berkenaan dengan pendidikan. Edukasi atau yang bisa disebut kemandirian adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Edukasi atau pendidikan bisa di peroleh dari banyak sarana baik secara formal yaitu sekolah maupun non formal yaitu membaca, menonton film, mendengarkan musik, bahkan melalui sosialisasi. Pendidikan merupakan unsur yang penting untuk meningkatkan sumber

daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan tercermin tingkah laku, budi pekerti, serta cara pandang yang lebih luas di bandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah.

Kemandirian dapat dimaknai sebagai cara pandang atau perilaku yang berbasis pertimbangan-pertimbangan nilai dan kebermanfaatannya atas suatu tindakan dan pemikiran.

Menurut Edi Suryadi dan Kusnendi, ciri-ciri perilaku kemandirian adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin.
- b. Kebutuhan untuk mampu mengontrol, mengendalikan, mengekang diri terhadap keinginan-keinginan yang melampaui batas.
- c. Keterkaitan dengan kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas kehidupan.
- d. Otonomi dalam makna menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui dan memahami sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang diperbuat.
- e. Inisiatif
- f. Etos kerja tinggi
- g. Berbudi luhur
- h. Toleran
- i. Patriotik
- j. Berorientasi ke ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemenuhan hak pendidikan memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk berkembang, dengan diarahkan melalui pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sebagai acuan dasar di dalam pendidikan. Dengan pendidikan untuk mengaktualisasi diri atau belajar untuk memberikan wawasan dan semua individu berhak untuk mengembangkan diri dan tidak terbatas oleh apapun dan siapapun.

Sistem pembinaan kemandirian digunakan sebagai salah bentuk sistem pembinaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak maupun orang dewasa, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan atau mengembangkan diri sendiri agar perannya didalam masyarakat kelak

dapat menjadi lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak maupun orang dewasa yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan atau dihapuskannya hak-hak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari narapidana tersebut.

Hak narapidana adalah wewenang yang ditetapkan oleh hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan. Menurut Dr.

Sahardjo, prinsip pemasyarakatan memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrument internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bagi perlakuan terhadap narapidana.

Berikut ini adalah hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 7 bahwa:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapat pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan proses pemindahan tahanan dan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan:

1. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan untuk memastikan semua pihak memahami prosedur dan tanggung jawab mereka. Hal ini dapat mengurangi kebingungan dan mempercepat proses pemindahan tahanan.
2. Pelatihan untuk Petugas: Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas yang terlibat dalam proses pemindahan tahanan untuk memastikan mereka memahami prosedur hukum dan etika yang harus diikuti. Ini juga termasuk pelatihan tentang penanganan tahanan wanita, yang mungkin memiliki kebutuhan khusus.
3. Penyempurnaan Dokumen dan Prosedur: Menyusun dan memperbarui dokumen yang diperlukan untuk pemindahan tahanan, seperti surat keterangan kesehatan dan berita acara serah terima, agar lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengisian dokumen.
4. Fokus pada Kesehatan Tahanan: Memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan tahanan dilakukan secara menyeluruh sebelum pemindahan. Ini penting untuk melindungi hak-hak tahanan dan memastikan mereka dalam kondisi baik untuk dipindahkan.
5. Evaluasi dan Umpan Balik: Membentuk komite evaluasi yang secara rutin menilai proses pemindahan tahanan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Ini dapat

membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mencari solusi yang tepat.

6. Peningkatan Layanan Hukum: Bekerja sama dengan organisasi hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada tahanan, terutama bagi mereka yang baru saja diputuskan bersalah. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses pemindahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta, Sinar Grafika. Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI,
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan,
- Satipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- Suryadi, Edi dan Kusnendi, 2010, *Kearifan Lokal dan Perilaku Kemandirian Ilmiah*, Bandung: Join Conference UPI&UPSI,
- Tiwan Setiawan, 2006, *Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang*, Semarang: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Semarang,
- Wahdaningsih, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Makassar: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin,
- Wawancara dengan Ibu Dewi Setya, Staff Bimker, 5 Januari 2024. Wawancara dengan WBP MA, 35 tahun, 5 Januari 2024.
- Wawancara dengan Rini Sulistyowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 5 Januari 2024.